

ABSTRACT

Australia is a country which to be one of the asylum seekers's destination, particularly from countries in the Asian region. Most of them are coming by boat or ship as a transport medium for heading Australia. Because they don't carry legal documents or the appropriate visa, the Australian government later said the asylum seekers who come by boat such as Irregular Maritime Arrivals or IMAs. IMAs existence is regarded as the embodiment of the government as well as the practice of illegal immigrant smuggling. In 2010, there was an increase in the flow of a high number of IMAs in Australia. In response, the government implemented a policy of punitive asylum seekers by boat. The policies include the implementation of the re-opened Pacific Solution, the return of asylum seekers to the origin country, and Malaysia Solution. This study will look at the factors that influence the government to implement these policies. This study uses the system theory, policy influence system pre theory, and prejudice theory in an attempt to answer the question how the forms of the Australian government implemented policies in dealing with IMAs during the reign of Julia Gillard and the factors that led these policies are finally taken. Methodologically, this study uses descriptive research type, with a range of research is began in 2010 until 2012. The hypothesis is supported by data indicating that the Australian government issued a closed immigration policy to immigrants who came by boat influenced by three factors, the bureaucracy, the party, and the public, with the bases on the consideration of negative prejudice inherent in the boat people as rationalization policy.

Key Words : Asylum Seekers, *Pacific Solution*, Immigration, *Bridging Visas*, Julia Gillard, Securitization Migration, Policy Influences

ABSTRAK

Australia merupakan negara yang menjadi salah satu negara tujuan para pencari suaka, khususnya yang berasal dari negara-negara di kawasan Asia. Sebagian besar pencari suaka tersebut menggunakan perahu atau kapal sebagai media transportasi untuk menuju ke Australia. Karena kedatangan mereka yang sebagian besar tidak membawa dokumen resmi ataupun visa yang sesuai, maka pemerintah Australia kemudian menyebut para pencari suaka yang datang dengan perahu tersebut sebagai Irregular Maritime Arrivals atau IMAs. Keberadaan IMAs tersebut dianggap pemerintah sebagai perwujudan dari imigran ilegal serta praktek penyelundupan manusia. Di tahun 2010, terjadi arus peningkatan jumlah IMAs yang tinggi di Australia. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan yang bersifat menghukum para pencari suaka dengan perahu. Kebijakan tersebut antara lain adalah penerapan kembali Pacific Solution, pengembalian pencari suaka ke negara asal, serta Malaysia Solution. Penelitian ini akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah hingga pada akhirnya menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori sistem, pre teori policy influence system, serta teori prejudice dalam upaya menjawab pertanyaan bagaimana bentuk-bentuk kebijakan yang diterapkan pemerintah Australia dalam menangani Irregular Maritime Arrivals pada masa pemerintahan Julia Gillard serta faktor-faktor apa yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya diambil. Peringkat analisis yang digunakan adalah negara bangsa. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan jangkauan penelitian yaitu mulai tahun 2010 ketika Perdana Menteri Julia Gillard mulai memegang pemerintahan sampai dengan tahun 2012 dimana kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan. Setelah melalui pembahasan, hipotesis yang diajukan didukung oleh data yang menyebutkan bahwa pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan imigrasi yang tertutup kepada imigran dengan perahu dengan dipengaruhi oleh tiga faktor pengaruh kebijakan yakni birokrasi, partai, dan publik, dengan melandaskan pada pertimbangan prejudice negatif yang melekat pada imigran dengan perahu sebagai rasionalisasi pengambilan kebijakan.

Kata Kunci : Pencari Suaka, *Pacific Solution*, Imigrasi, *Bridging Visas*, Julia Gillard, Sekuritisasi Migrasi, Pengaruh Kebijakan